



KLIPING

BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Media cetak:

- Bangka Pos
- Babel Pos
- Babel News
- Radar Bangka
- Rakyat Pos
- Lainnya: _____

Tanggal:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Bulan:

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12

Thn:

2
0
1
6

Halaman:

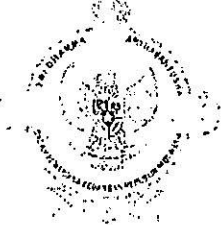
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Dana Bansos Bangka Rp1,9 M DITILEP

- Diduga Diseleweng Oknum Bendahara DPPKAD
- SI Kabur, Kadin Terkesan Menutupi

SUNGAILIAT - Oknum Bendahara Bantuan Sosial di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka yang berinisial SI, diduga telah menyelewengkan dana bantuan sosial (bansos) tahun anggaran 2015 sekitar Rp1,9 miliar.

Hal tersebut terkuak, setelah Pemerintah Kabupaten Bangka menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2015 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bangka Belitung (Babel) belum lama ini. Atas penyelewengan dana bansos tersebut, BPK ● ke Hal 11 Kol 5



KLIPING

BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Media cetak:

- Bangka Pos
- Babel Pos
- Babel News
- Radar Bangka
- Rakyat Pos
- Lainnya: _____

Tanggal:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Bulan:

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12

Thn:

2
0
1
6

Halaman:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Dana Bansos Bangka Rp1,9 M Ditilep,

Provinsi Babel menjadikannya sebagai temuan dan Pemkab Bangka terancam tidak bisa meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun ini.

Informasi yang berhasil dihimpun dari salah satu sumber menyebutkan, sang oknum bendahara bansos DPPKAD Kabupaten Bangka itu dalam menyelewengkan uang negara, diduga telah memalsukan tanda tangan para pejabat terkait agar dana bansos tersebut dapat dicairkan.

"Dana itu anggarannya dari APBD tahun 2015 yang dianggarkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Contohnya orang sakit, tapi tidak mampu dibantu oleh Pemda, korban bencana kebakaran, meninggal dunia dan lainnya. Kira-kira seperti itulah peruntukkan dana bansos tersebut," ungkap sumber itu.

Namun dana yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan ini, ternyata tidak terealisasi ke sasarannya karena diduga diselewengkan oleh oknum PNS di DPPKAD Bangka, hingga mencapai angka Rp1,9 miliar dan menjadi temuan BPK Provinsi Babel. Dan atas penyelewengkan tersebut, men-

rut sumber ini, sang oknum SI sempat melarikan diri dan tidak masuk kerja.

Sementara itu, Kepala DPPKAD Kabupaten Bangka, Iwan Hindani yang sebelumnya sempat dikonfirmasi, enggan memberikan keterangan pasti terkait dugaan penyelewengkan dana Bansos oleh oknum pegawai DPPKAD ini.

"Kejadian itu terjadi sebelum saya menjabat sebagai kepala dinasny. Jadi saya tidak mengetahui secara pasti atas dugaan penyelewengkan itu," katanya.

Saat ditanya apakah dia mengetahui oknum yang dimaksud sempat tidak ngantor sekian lama lantaran dugaan penyelewengkan dana bansos tersebut akhirnya terkuak, Iwan pun terkesan menutupi.

"Tidak seperti itu dan memang dia sempat tidak ngantor beberapa hari karena ada urusan keluarga. Namun jika memang dia terbukti, maka dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya," tukas Iwan.

Terpisah, Wakil Bupati Bangka, Rustamsyah yang ditemui Selasa siang (12/7/2016) juga enggan mengomentari terkait dugaan penyelewengkan dana Bansos di DPPKAD Kabupaten Bangka tahun anggar-

an 2015 ini.

Namun Wabup membenarkan adanya temuan BPK Provinsi Babel atas LHP yang dikembalikan kepada Pemkab Bangka untuk diselesaikan dalam waktu 60 hari.

"Kalau sudah diselesaikan, itu bukan temuan lagi namanya. Makanya kita tunggu lah selama 60 hari ini temuan tersebut apakah diselesaikan atau tidak. Karena kalau tidak, maka akan menjadi temuan BPK dan akan diketahui siapa-siapa saja yang terlibat di dalamnya," ujar Rustamsyah.

Menurut dia, temuan tersebut merupakan kewajiban pemerintah daerah apabila ada temuan yang bersifat keuangan seperti kekurangan pembayaran pajak walau hanya Rp7 juta atau Rp700 ribu, harus dilunasi. Dan faktur pembayaran harus dilampirkan sebelum disampaikan kembali ke BPK.

Terkait adanya dugaan pemalsuan tanda tangan oleh oknum SI serta jarang ngantor, Wabup enggan mengomentari hal tersebut.

"Bapak hanya mengomentari secara umum saja dan diminta BPK selesaikan temuan itu sesuai aturan yang telah ditetapkan," tandasnya. (2nd/6)